

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abvianto Syaifulloh, *et.all*, 2025, *Prinsip Hukum Dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dan Kepentingan Pihak Ketiga*, Kencana, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologi*, Toko Gunung Agung, Jakarta
- 2009, *Menguak Teori Hukum—(Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana, Jakarta
- Agus Kasiyanto, 2021, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa*, Kencana, Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta
- 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Dalam Fred N. Kerlinger, Asas Asas Penelitian Behavioral, Diterjemahkan Landung R. Simatupang*, Kencana, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Rajawali Pers, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bernadeta Maria Erna, 26 Oktober 2013, *Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam*

*pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung*

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Disiplin F. Manao Dkk, 2017, *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

Elwi Danil, 2011, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo, Jakarta

2014, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Ferry Agus Sianipar, 2024, *Dasar Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Kejahatan*, Eureka Media Aksara, Purbalingga

Fred N. Kerlinger, 2002, *Asas Penelitian Behavioral*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Gustav Radbruch, 2008, dikutip dalam: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta

Hans Kelsen, 2008, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Jakarta

Harahap Erisna, 2006, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Grafiti, Bandung

Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung

M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Madju, Bandung

Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta



- Muladi, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cetakan kedua*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Muladi dan Barda Nawai Arif, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta Selatan
- Romli Atmasasmita, 23-27 Februari 2014, *Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangannya Dewasa Ini*, Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta
- Rudi Margono, 2025, *Peran Kejaksaan dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara*, Yayasan Putra Adi Dharma, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta
2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ketujuh*, Liberty, Yogyakarta
- Widyopramono, 23-27 Februari 2014, *Peran Kejaksaan Terhadap Aset Revocery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, *Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi “Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta*

*Perkembangannya Dewasa ini*, Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Wisnu Murtopo Nur Muhamad, *et.al*, 2023, *Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Adab, Indramayu

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

## JURNAL

Ade Mahmud, "Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Yudisial*(3), 11:347.

<https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>

2018.

Aliyth Prakarsa, and Rena Yulia, "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Prioris*(1), 6.

<https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1834>

2017.

Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*

*Ekonomi*, Vol.10, No. 1,

2019.

Aziez Syarifudin dan Muhammad Amruddin Latif, "Analisis Masalah tentang Perampasan Aset Terpidana Korupsi terkait RUU Perampasan Aset", *Jurnal Al Tarmasi*, Vol. 2, No. 1,

2024.

Daniatul Izzah, Taufeni Taufik, and Vera Oktari, "Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa Di Kabupaten Kampar", *Current Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*(1), 2:12-28. <https://doi.org/10.31258/jc.2.1.12-28>

2021.

Dicky Andriyanto, Zaki Baridwan, and Imam Subekti, "Anteseden Perilaku Penggunaan E-Budgeting: Kasus Sistem Informasi Keuangan Desa di Banyuwangi, Indonesia", *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*(2), 6:151-170. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i2.13938>

2019.

Ibnu Kholik dan Edi Warwan, "Perampasan Harta Benda Terdakwa Sebagai Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara Dalam Prespektif Keadilan Pancasila", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 31, No.1,

2023.

Irsyad Zamhier Tuahuns, "Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6,

No. 1,

2021.

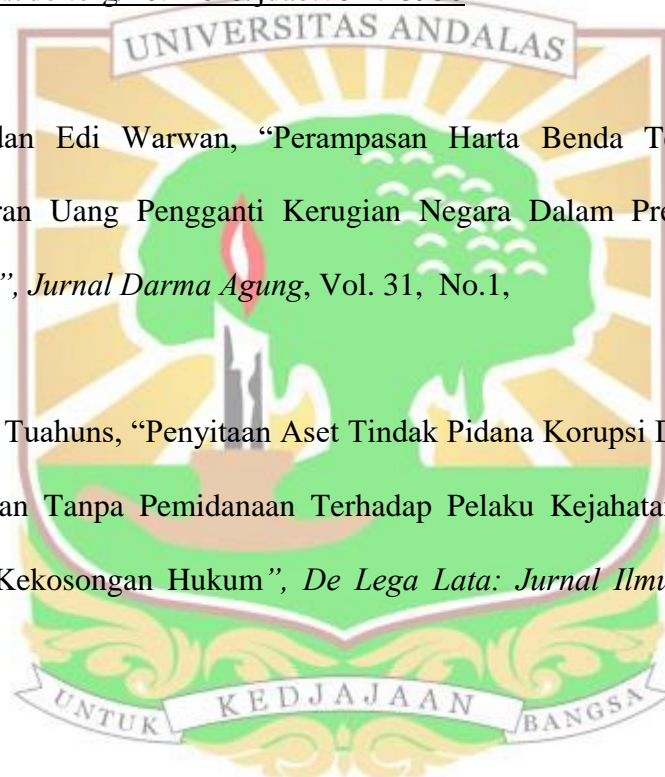
Lonna Yonanes Lengkong, "Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 9, No. 3,

2023.

Muhammad Nur Aziiz, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa", *Jurnal Akuntansi Aktual*(2), 6:334-344.

<https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>

2019.



Ni Nyoman Alit Triani and Susi Handayani, "Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*(1), 9.

<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>

2018.

Nike Mutiara Fauziah, and Ria Karlina Lubis, "Sound Governance: Model Kolaborasi Multilevel sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Desa", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Asian (Asosiasi Ilmuwan Administrasi*

*Negara*)(2), 10:440-451. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.115>

2022.

Nurannisa Salsadila, Ayu Efridadewi dan Heni Widiyani, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 2,

2023.

Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, and Hendrik Gamaliel, "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*(2), 8.

<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>

2017.

Srimin Pinem, Rizkan Zulyadi dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, "Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Yuridis Analisa Fenomena Hukum Sebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah*, Vol. 10, No. 2,

2023.



Tsalis Abida Nurdin, “Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Yang Sudah Menerapkan Nonconviction Based Aset Forfeiture”, *Jurnal Recidive*, Vol. 13, No. 2, 2024.

Yohanes, *et.al*, “Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023.

Yuli Budiati, Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto, and Asih Niati, "PENGARUH GCG TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN MODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL", *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*(4), 3:425-444. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127> 2020.

Zikril Akbar Tanjung, “Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *National Journal of Law*, Vol. 8, No. 1, 2024.



## WEBSITE

Gramedia Blog, “Literasi Teori Kepastian Hukum”, [https://www.Gramedia.Com/Literasi/Teori-Kepastian-Hukum/#Google\\_Vignette](https://www.Gramedia.Com/Literasi/Teori-Kepastian-Hukum/#Google_Vignette), dikunjungi pada tanggal 11 Desember 2025 jam 12.30.

Dian Dwi Jayanti, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan->

[penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/](#), dikunjungi pada tanggal 11 Desember 2025 jam 12.05.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Ri Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020  
Tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi

Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020  
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-  
027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor:  
B-01/F/FJP/09/2022 tentang Pidana Tambahan Penghapusan Seluruh atau  
Sebagian Keuntungan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

